



RENCANA AKSI KEGIATAN 2015 - 2019

**BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN
PENGENDALIAN PENYAKIT (BTKLPP) KELAS I MAKASSAR**

**DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENYAKIT DAN
PENYEHATAN LINGKUNGAN (DITJEN PPPL)**

KEMENTERIAN KESEHATAN RI

2015

KATA PENGANTAR



Puji Syukur kami panjatkan kehadirat ALLah SWT, karena atas karunia rahmat dan berkahNya sehingga Rencana Aksi Kegiatan (RAK) tahun 2015 BTKLPP Kelas Makassar dapat diselesaikan.

Sesuai dengan Inpres Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan kepada setiap instansi pemerintah untuk melaksanakan Akuntabilitas Kinerja Instansi sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan organisasi, di mana salah satu kegiatan yang harus dilakukan adalah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Aksi Program (RAP) tingkat Pusat untuk dan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) pada tingkat satuan kerja.

Rencana Aksi Kegiatan (RAK) BTKLPP Kelas I Makassar merupakan penjabaran dari Rencana Aksi Program (RAP), dan juga mengacu pada Perpres No. 2 tahun 2015 tentang RPJMN 2015 – 2019, Sehingga RAK ini memuat sasaran, kebijakan dan kegiatan yang akan dilaksanakan BTKLPP Kelas I Makassar.

Dengan disusunnya RAK Tahun 2015-2019 diharapkan dapat dijadikan acuan dalam penyusunan Perencanaan Kegiatan dan sebagai dasar pelaksanaan tugas dan fungsi BTKLPP Kelas I Makassar guna mencapai tujuan dan sasaran pembangunan bidang kesehatan.

Kami menyadari bahwa **RAK** ini masih banyak terdapat kekeliruan dan masih memerlukan perbaikan secara menyeluruh, hal ini tidak lain disebabkan karena keterbatasan ilmu dan kemampuan yang dimiliki dalam menyelesaikan dokumen ini, karenanya berbagai masukan dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi menyempurnakan dokumen ini.

Makassar, Agustus 2015

Kepala BTKLPP Kelas I Makassar

dr. H. Sukiman, M.Kes

DAFTAR ISI

Kata Pengantar
Daftar Isi

BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Kondisi Umum	1
	B. Potensi	2
	C. Permasalahan	3
BAB II	VISI MISI dan SASARAN	
	A. Visi Misi	9
	B. Sasaran Strategis	9
BAB III	ARAH KEBIJAKAN dan STRATEGI PELAKSANAAN	
	A. Arah Kebijakan	10
	B. Strategi Pelaksanaan	12
BAB IV	RENCANA KINERJA dan KERANGKA PENDANAAN	
	A. Rencana Kinerja	13
	B. Pendanaan	15
BAB V	PEMANTAUAN, PENILAIAN dan PELAPORAN	
	A. Pemantauan	16
	B. Penilaian	16
	C. Pelaporan	18
BAB VI	PENUTUP	19

Daftar Lampiran

- Lampiran 1. Matrik Rencana Kinerja BTKLPP Kelas I Makassar Tahun 2015–2019
Lampiran 2. Matrik Prakiraan Anggaran Maju BTKLPP Kelas I Makassar 2015– 2019
Lampiran 3. Matriks Prakiraan Anggaran Kegiatan berdasarkan Sumber Dana Tahun 2015 - 2019

BAB I PENDAHULUAN

A. KONDISI UMUM

Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri berkepribadian berlandaskan gotong royong merupakan visi dan misi Presiden RI untuk periode 2015 – 2019. Pembangunan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya sebagai prasyarat agar mereka dapat hidup produktif dalam kehidupan penghidupannya. Dengan demikian masyarakat dapat memperoleh keadilan kemandirian guna mewujudkan hidup sehat, mandiri, berkeadilan. Kesehatan diwujudkan dalam program-program yang merupakan prioritas dalam rangka mencapai tujuan sasaran pembangunan dengan mempertimbangkan komitmen internasional, dan regional kebijakan local.

Arah pembangunan kesehatan semakin didorong untuk mampu mendukung upaya perkuatan ekonomi, social budaya, pertahanan keamanan bahkan kehidupan politik yang sangat dinamis, mengingat kesehatan merupakan salah satu hak azasi manusia yang dijamin dalam peraturan perundangan maupun konvensi internasional. Untuk itu, berbagai program telah dikembangkan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan secara bertahap, baik dalam jangka pendek, menengah maupun jangka panjang.

Salah satu program dalam lingkup pembangunan kesehatan adalah Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan yang bertujuan untuk menurunkan angka kesakitan, kematian dan kecacatan

akibat penyakit. Program ini diarahkan agar berbagai penyakit menular, penyakit tidak menular dan factor risikonya dapat terkendali dan diupayakan tidak menjadi masalah kesehatan masyarakat.

B. POTENSI

BTKLPP Kelas I Makassar secara bertahap telah melakukan berbagai upaya agar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dapat terlaksana secara optimal dan mampu menjalankan peran sebagai “Regional center of excellent” dalam surveilans epidemiologi berbasis laboratorium dan diharapkan mampu mendukung serta mempercepat pencapaian sasaran Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan Fungsi BTKLPP Kelas I Makassar telah di dukung oleh Laboratorium terakreditasi oleh badan yang berwenang sebagai landasan yang legal untuk memberikan layanan public dan melaksanakan program yang telah direncanakan dan Peningkatan SDM yang terlatih serta Meningkatkan Uji Mutu dengan mengimplementasikan SNI ISO/IEC 17025:2008 tentang persyaratan umum kompetensi laboratorium penguji dan kalibrasi, Demikian juga kemampuan pengelolaan anggaran terus ditingkatkan sesuai dengan fungsi secara optimal.

C. PERMASALAHAN

Jangkauan program dan pelayanan masih belum optimal karena berbagai kendala dan hambatan, Keterjangkauan wilayah layanan belum optimal mengingat wilayah kerja yg luas dan medan yg berat, Serta keterbatasan sumber daya manusia, namun secara terus menerus dilakukan upaya penguatan terhadap kinerja sumber daya manusia yang ada melalui perekrutan tenaga baru maupun peningkatan keterampilan teknis dan manajemen terhadap SDM yang ada. Beberapa peralatan esensial dilakukan peningkatan kapasitas, pembaharuan teknologi dan kelengkapannya.

Dalam menjalankan peran pengembangan surveilans epidemiologi berbasis laboratorium, salah satu permasalahan menonjol yang dihadapi BTKLPP Kelas I Makassar adalah lemahnya jejaring surveilans di daerah sehingga arus pertukaran data belum berjalan secara optimal, Euforia desentralisasi yang masih berlebihan mengakibatkan tata hubungan kerja dan kemitraan belum terjalin dengan baik karena lebih mementingkan kewenangan dari pada pelaksanaan urusan pemerintahan yang bersifat kongkruen.

Sebagai gambaran belum seluruh kejadian penyakit maupun pencemaran lingkungan yang berdampak terhadap kesehatan direspon sesuai dengan prosedur yang berlaku, sehingga mengakibatkan penyakit makin menyebar dan menimbulkan korban karena ego sektoral. Belum terbentuknya mekanisme operasional di lapangan berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing menyebabkan

koordinasi dan komunikasi dalam penyelesaian masalah kejadian penyakit menjadi berlarut-larut.

Situasi epidemiologi saat ini dan beberapa tahun mendatang merupakan masa transisi yaitu penyakit menular masih belum seluruhnya dapat dikendalikan bahkan muncul kembali, demikian pula terjadinya endemisitas penyakit di beberapa wilayah seperti endemisitas schistosomiasis di propinsi Sulawesi Tengah (Kabupaten Poso dan Kabupaten Sigi), munculnya penyakit Taeniasis yang terdapat di kabupaten Tanah Toraja dan Toraja Utara Propinsi Sulawesi Selatan, dilain pihak penyakit tidak menular termasuk cedera dan kecelakaan semakin meningkat insidensi atau prevalensinya.

Hal ini jelas menjadi beban ganda karena semakin kompleks dan meluasnya penyebaran penyakit menular antar wilayah maupun antar Negara termasuk munculnya penyakit baru yang berpotensi wabah dan menjadi masalah emergensi internasional dan ditambah meningkatnya prevalensi penyakit tidak menular yang menguras berbagai sumber daya.

Dalam upaya pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan telah disepakati berbagai komitmen untuk meningkatkan jangkauan pelayanan, seiring dengan meningkatnya permasalahan lingkungan diantaranya munculnya tambang-tambang rakyat yang berpotensi menimbulkan pencemaran air dan udara seperti di kabupaten Bombana Propinsi Sulawesi Tenggara, Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat.

Dari uraian di atas BTKLPP Kelas I Makassar dengan potensi sumber daya yang tersedia dan tantangan permasalahan yang dihadapi memandang perlu untuk semakin meningkatkan profesionalisme SDM yang ada, peralatan esensial, dan jangkauan pelayanan program untuk mencapai sasaran strategis yang ditetapkan melalui pengembangan jejaring kerja dan kemitraan dalam kinerja surveilans epidemiologi berbasis laboratorium, meningkatkan kemampuan pengembangan teknologi tepat guna, serta memperkuat wilayah kerja agar mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi di bidang pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan. Diperlukan pula dukungan anggaran yang memadai agar seluruh tugas pokok dan fungsi serta peran BTKLPP Kelas I Makassar dapat terlaksana secara optimal.

BAB II **VISI MISI TUJUAN DAN SASARAN**

A. VISI dan MISI

BTKLPP Kelas I Makassar dalam Rencana Aksi Kegiatan 2015 – 2019 mendukung Visi dan Misi Pemerintah yakni : **“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepriadian berlandakan Gotong Royong”**.

Untuk mewujudkan Visi tersedut, akan dilakukan 9 (sembilan) agenda prioritas yang disebut Nawa Cita, yaitu :

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara.
 2. Membuat pemerintahan tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
 3. Membangun membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
 4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
 5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
 6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
 8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
- 

9. Memperteguh ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pemberantasan Penyakit Menular (BTKLPP) Kelas I Makassar merupakan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal PP & PL, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 2349 tanggal 22 November 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Bidang Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit.

BTKLPP Kelas I Makassar mempunyai tugas melaksanakan surveilans epidemiologi, kajian dan penapisan teknologi, laboratorium rujukan, kendali mutu, kalibrasi, pendidikan dan pelatihan, pengembangan model dan teknologi tepat guna, kewaspadaan dini dan penanggulangan kejadian luar biasa (KLB) di bidang pemberantasan penyakit menular dan kesehatan lingkungan serta kesehatan mata. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BTKL PP melaksanakan fungsi:

- a. Pelaksanaan surveilans epidemiologi,
 - b. Pelaksanaan analisis dampak kesehatan lingkungan (ADKL)
 - c. Pelaksanaan laboratorium rujukan
 - d. Pelaksanaan pengembangan model dan teknologi tepat guna
 - e. Pelaksanaan uji kendali mutu dan kalibrasi
 - f. Pelaksanaan penilaian dan respon cepat, kewaspadaan dini dan penanggulangan KLB/wabah dan bencana
- 

- g. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan
- h. Pelaksanaan kajian dan pengembangan teknologi pemberantasan penyakit menular, kesehatan lingkungan dan kesehatan matra
- i. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan BTKL PP.

Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut di atas BTKL PP Kelas I Makassar dilengkapi dengan 6 instalasi, yaitu Laboratorium Fisika Kimia Air, Padat, B3, Laboratorium Media Reagensia, Gas dan Radiasi, Laboratorium Biologi, Biomarker dan Klinis, Laboratorium Pengendalian Mutu, Pengujian, dan Kalibrasi, Pengembangan Teknologi Tepat Guna, Pelayanan Teknis, Pendidikan dan Pelatihan, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Kesehatan Matra.

Berdasarkan Lampiran IV Keputusan Menteri Kesehatan No. 267/Menkes/SK/III/2004, tempat kedudukan BTKL-PP Kelas I Makassar adalah di Makassar dengan wilayah kerja Provinsi Sulawesi Selatan, Tengah, Tenggara, dan Sulawesi Barat, Sedangkan berdasarkan SK Direktur Jenderal PPM-PL No. HK.00.06.7.426 tanggal 4 Februari 2003 sebagai pusat pengendalian operasional sentra regional dalam rangka kesiapsiagaan mencegah dan menanggulangi penyakit menular pasca bencana dan mempercepat pelayanan kesehatan bidang PP dan PL kepada korban bencana dan pengungsi, BTKLPP Kelas I mempunyai wilayah Layanan Provinsi Sulawesi Selatan, Tengah, Tenggara, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Maluku, Papua serta Papua Barat.

B. SASARAN STRATEGIS

Sasaran :

Meningkatnya penanggulangan penyakit dan kesehatan lingkungan berbasis laboratorium.

Sedangkan untuk **Indikator kinerja kegiatannya**, adalah :

- 1) Jumlah respon Signal SKD dan KLB, Bencana, wabah dan kondisi matra lain.
- 2) Jumlah kegiatan surveilans atau kajian faktor risiko penyakit dan penyehatan lingkungan berbasis laboratorium
- 3) Jumlah Advokasi atau jejaring kemitraan surveilans faktor risiko penyakit atau penyehatan lingkungan atau penguatan laboratorium.
- 4) Jumlah pengujian laboratorium dan kalibrasi.
- 5) Jumlah Model dan Teknologi Tepat Guna bidang PP dan PL yang dihasilkan.
- 6) Jumlah SDM terlatih bidang PP dan PL
- 7) Persentase kelengkapan dokumen perencanaan/ laporan/ pengelolaan keuangan/ kepegawaian dan BMN.
- 8) Persentase ketepatan waktu pengiriman laporan pengelolaan keuangan/ kepegawaian/ BMN
- 9) Perangkat Pengolah data komunikasi, Informasi dan peralatan fasilitas perkantoran

BAB III **ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI**

A. Arah Kebijakan

Pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan dalam lingkup tugas dan fungsi BBTCLPP yang merupakan bagian integral dari Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan secara nasional dalam periode 2015 – 2019 diarahkan untuk memantapkan peran BBTCLPP dalam penyelenggaraan PP & PL berbasis Laboratorium dengan focus peningkatan kinerja Surveilans Epidemiologi, kemampuan analisis dampak kesehatan lingkungan dan pengembangan Teknologi Laboratorium.

Kegiatan peningkatan kinerja Surveilans Epidemiologi dilaksanakan dengan mengutamakan identifikasi factor risiko penyakit potensial wabah, penyakit baru, penyakit menular endemic dan penyakit tidak menular prioritas melalui pemetaan wilayah atau kawasan, kajian pola penyebaran, dan pengujian virulensi, potensi, kerentanan dan resistensi maupun kajian terhadap biomonik vector dan binatang menular penyakit. Di samping itu juga dilakukan peningkatan kemampuan kewaspadaan dini dan respon terhadap KLB/wabah, kejadian bencana, maupun penanggulangan dan upaya-upaya pencegahan seperti desinfeksi, dekontaminasi, dan desinseksi serta pengembangan teknologi tepat guna.

Kegiatan peningkatan kemampuan analisis dampak kesehatan lingkungan dilaksanakan dengan mengutamakan kajian terhadap rencana pembangunan kawasan atau evaluasi terhadap dampak pembangunan,

daerah rawan bencana, rawan pencemaran lingkungan maupun kawasan endemic penyakit tertentu melalui analisis factor risiko potensial, luas area persebaran dampak dan populasi terancam. Dalam kegiatan analisis dampak kesehatan lingkungan ini, di samping untuk memberikan masukan pertimbangan upaya pengendalian factor risiko penyakit juga dimaksudkan untuk memberikan masukan dalam pengelolaan lingkungan hidup suatu wilayah berkenaan dengan kualitas media lingkungan dan potensi timbulnya pencemaran lingkungan.

Kegiatan peningkatan kinerja Pengembangan Teknologi Laboratorium dilaksanakan dengan mengutamakan dukungan pujian laboratorium terhadap media lingkungan sebagai factor risiko potensial penyakit, gangguan kesehatan, maupun pencemaran lingkungan yang berdampak terhadap kesehatan. Di samping itu juga ditingkatkan peran sebagai rujukan, bimbingan teknis dan pendampingan, uji kendali mutu dan kalibrasi serta kemampuan rancang bangun model dan Teknologi Tepat Guna sebagai dan tindak lanjut pemecahan masalah pengendalian risiko potensial penyakit maupun gangguan kesehatan lainnya. Selain mendukung upaya pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan kinerja pengembangan teknologi laboratorium juga berperan dalam pemberian layanan publik dalam mengidentifikasi dan analisis berdasarkan uji laboratorium serta memberikan rekomendasi tindak lanjutnya.

Selain itu guna memberikan dukungan terhadap kinerja di atas dilakukan peningkatan kualitas manajemen yang mencakup pembiayaan, sumber daya manusia, pemenuhan peralatan essensial dan saran

penunjang operasional serta jaringan informasi yang komunikatif melalui peningkatan kualitas perencanaan dan penetapan akuntabilitas kinerja, penyiapan prosedur kerja, peningkatan tata hubungan kerja, ketersediaan logistic serta dukungan administrasi ketatausahaan, urusan umum dan rumah tangga serta peningkatan administrasi kepegawaian.

B. Strategi

Untuk mencapai target kegiatan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan tahun 2015, berikut Strategi yang akan dilaksanakan oleh BTKLPP Kelas I Makassar :

1. Persentase signal kewaspadaan dini yang direspon sebesar 90%
 2. Persentase upaya pengendalian faktor risiko pada wilayah dengan kondisi matra sebesar 100%
 3. Persentase respon KLB, Bencana di wilayah layanan sebesar 100%
 4. Persentase teknologi tepat guna penunjang kegiatan Surveilans, dan pengendalian faktor risiko penyakit, serta pada Kesehatan Matra yang meningkat 50% dari jumlah TTG tahun sebelumnya.
 5. Persentase kajian/ rekomendasi surveilans dan pengendalian faktor risiko penyakit dan Penyehatan Lingkungan berbasis laboratorium
- 

BAB IV RENCANA KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Rencana Kinerja

Prioritas pembangunan bidang kesehatan yang menjadi Sasaran BTKLPP Kelas I Makassar adalah : 1) Peningkatan surveilans kesehatan; 2) Peningkatan analisis dampak kesehatan lingkungan; 3) Peningkatan Teknologi Laboratorium; dan 4) Peningkatan Dukungan administrasi dan manajemen.

Sasaran tersebut tertuang dalam dokumen Indikator Program PPPL dalam RPJMN dan Renstra Kementerian Kesehatan 2015 – 2019. Hal ini tentunya dalam rangka keselarasan mulai dari RPJMN, Renstra, Rencana Aksi Program (RAP), Rencana Aksi Kegiatan (RAK), dan Penetapan Kinerja.

Adapun Sasaran Strategis yang akan dicapai, adalah : *“Meningkatnya penanggulangan penyakit dan kesehatan lingkungan berbasis laboratorium”*.

Untuk mencapai sasaran tersebut, BTKLPP Kelas I Makassar menetapkan target indikator kinerja, yaitu :

1. Jumlah Signal SKD dan KLB, Bencana, Wabah dan Kondisi Matra lainnya sebanyak 100 Respon/ Laporan/ Kejadian
2. Jumlah Kegiatan Surveilans atau Kajian Faktor Risiko Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Laboratorium sebanyak 800 laporan.
3. Jumlah Advokasi/ Jejaring Kemitraan Surveilans Faktor Risiko Penyakit/ Penyehatan Lingkungan/ Penguatan Laboratorium sebanyak 795 kegiatan/ laporan.

4. Jumlah Advokasi/ Jejaring Kemitraan Surveilans Faktor Risiko Penyakit/ *Penyehatan Lingkungan*/ Penguatan Laboratorium sebanyak 17.200 sampel.
5. Jumlah Model atau Teknologi Tepat Guna Bidang P2P yang dihasilkan sebanyak 31 jenis.
6. Jumlah SDM terlatih bidang P2P sebanyak 1.070 orang,
7. Persentase kelengkapan Dokumen Perencanaan/ Laporan/ Pengelolaan Keuangan/ Kepegawaian/ BMN sebesar 100%.
8. Persentase Ketetapan Waktu Pengiriman Laporan Pengelolaan Keuangan/ Kepegawaian/ BMN sebesar 100%.
9. Peralatan esensial dan sarana penunjang operasional sebanyak 140 Set/Unit.

Sesuai amanat reformasi perencanaan dan penganggaran, disebutkan bahwa program merupakan tanggung jawab unit Eselon-I dan dalam bentuk kegiatan yang menjadi tanggung jawab unit kerja di lingkungannya. Program menghasilkan *outcome*. Sedangkan kegiatan menghasilkan output yang mendukung pencapaian *outcome* program.

BTKLPP Kelas I Makassar melaksanakan 1 Program yaitu Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan. Program tersebut mencerminkan tugas pokok dan fungsi dari 5 unit Eselon-II lingkup Direktorat Jenderal Pengendalian penyakit dan Penyehatan Lingkungan. Ukuran keberhasilan Eselon-I dalam menjalankan program tersebut diukur kinerjanya dalam bentuk *outcome*. Sebagaimana diketahui bahwa *outcome* merupakan hasil dari *output* kegiatan yang dilaksanakan oleh unit kerja di bawahnya (eselon-II dan III).

B. Penganggaran Kegiatan

Pembiayaan Rencana Kerja BTKLPP Kelas I Makassar dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (Ditjen PP PL) Kementerian Kesehatan melalui DIPA Petikan, dimana Sumber pendanaanya bersumber dari Rupiah Murni (RM) dan Penerimaan Pajak Negara Bukan Pajak (PNBP).

Rincian pendanaan dapat dilihat pada lampiran dokumen ini.

BAB V PEMANTAUAN, PENILAIAN DAN PELAPORAN

A. PEMANTAUAN

Pemantauan dimaksudkan untuk melakukan sinkronisasi dari keseluruhan proses kegiatan agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dengan perbaikan segera agar dapat dicegah kemungkinan terjadinya penyimpangan ataupun ketidaksesuaian yang berpotensi mengurangi bahkan menimbulkan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran.

Untuk itu, pemantauan diarahkan guna mengidentifikasi jangkauan pelayanan, kualitas pengolahan, permasalahan yang terjadi serta dampak yang ditimbulkannya.

B. PENILAIAN

Penilaian dimaksudkan untuk memberikan bobot atau nilai terhadap hasil yang dicapai dalam keseluruhan pentahapan kegiatan, untuk proses pengambilan keputusan apakah suatu program atau kegiatan diteruskan, dikurangi, atau dikembangkan (akselerasi). Untuk itu, penilaian diarahkan guna mengkaji efektifitas dan efisiensi pengelolaan program.

Untuk itu perlu adanya Defenisi Operasional untuk setiap indikator kegiatan sebagai acuan dalam penilain tersebut. Defenisi Operasional tiap indikator dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No	Indikator	Defenisi Operasional	Satuan Ukur
1	Jumlah respon signal SKD dan KLB, Bencana, wabah, dan kondisi matra lain.	Jumlah fasilitas respon signal SKD dan KLB, Bencana, wabah, kondisi matra kurang dari 24 jam dan lainnya yang dilaksanakan dalam 1 tahun	Kejadian/ lokasi
2	Jumlah kegiatan surveilans atau kajian faktor risiko penyakit dan penyehatan lngkungan berbasis laboratorium	Jumlah laporan hasil Kegiatan surveilans atau kajian faktor risiko kesehatan yang berbasis laboratorium baik analisis dampak kesehatan lingkungan, Surveilans Epidemiologi, kajian pengembangan pengujian dan kendali mutu laboratorium dalam 1 tahun.	Laporan,

17 | Rencana Aksi Kegiatan
2015 - 2019

3	Jumlah advokasi atau jejaring kemitraan surveilans faktor risiko penyakit atau penyehatan lingkungan atau penguatan laboratorium	Jumlah kegiatan (kali) pertemuan teknis yang dihadiri dana tau diselenggarakan oleh unit pelaksana teknis dalam kerangka penyusunan materi suatu kebijakan, peraturan perundang-undangan, pedoman, standart, baku mutu, kriteria atau kegiatan yang relevan.	Keg/Lap
4	Jumlah pengujian laboratorium dan kalibrasi	Jumlah pemeriksaan sampel di laboratorium secara fisik, kimia, dan biologi untuk sampel air, padat dan gas selama 1 tahun.	Sampel
5	Jumlah model atau teknologi tepat guna bidang PP dan PL yang dihasilkan	Jumlah pengembangan teknologi tepat guna pengendalian penyakit, kesehatan lingkungan dan kesehatan mata.	jenis
6	Jumlah SDM terlatih Bidang PP dan PL	SDM terlatih baik internal atau eksternal yang mengikuti pendidikan/ pelatihan/ magang di BTKLPP dalam waktu 1 tahun Meningkatnya kelengkapan dokumen perencanaan /laporan /pengelolaan keuangan /kepegawaian /BMN	orang
7	Persentase kelengkapan dokumen perencanaan/ laporan/ pengelolaan keuangan/ kepegawaian/ BMN	Persentase jumlah kegiatan manajemen dan administrasi dalam mendukung pelaksanaan teknis dan program, meliputi : Dokumen Perencanaan dan anggaran, dokumenevaluasu dan pelaporan, dokumen pengelolaan keuangan, dokumen kepegawaian dan BMN.	100%
8	Persentase ketepatan waktu pengiriman laporan pengelolaan keuangan/ kepegawaian/ BMN	Persentase jumlah pengiriman laporan terkait dengan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal dan waktu yang telah ditetapkan setiap periode pengiriman laporan baik secara online maupun offline.	Ketepatan waktu 100%
9	Perangkat Pengolah data komunikasi, informasi dan peralatan fasilitas perkantoran	Peralatan essensial dan sarana penunjang operasional	Set

C. PELAPORAN

Pelaporan pertanggungjawaban keuangan (APBN) dibuat oleh satuan kerja sebagai bentuk dari Akuntabilitas yang dibuat oleh satuan kerja sesuai Undang Undang No. 17 tahun 2003 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang berkaitan.

Selain itu laporan pertanggungjawaban keuangan, juga diwajibkan membuat Laporan Kinerja (*sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No. 53 tahun 2014*) yang merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap satuan kerja atas penggunaan anggaran.

BAB VI

PENUTUP

Rencana Aksi Kegiatan (RAK) 2015 - 2019 berisi tentang sasaran, strategi pencapaian output dan kegiatan yang dilaksanakan tiap tahun merupakan pedoman dalam menyelenggarakan pembangunan kesehatan khususnya dalam mencapai program Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan 5(lima) tahun ke depan.

Di samping itu dengan ditetapkan indikator-indikator kinerja dari kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga dapat diukur capaian kinerjanya sekaligus memudahkan untuk mengadakan evaluasi keberhasilan dan kegagalan.

Kunci keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan terletak pada kemampuan menciptakan sinergisme dan keterpaduan dari unit-unit kerja yang ada melalui pemantapan sistem dan metoda perencanaan, peningkatan kualitas SDM, penataan kelembagaan dan peningkatan koordinasi antara instansi terkait. Dengan demikian hal-hal yang dapat menjadikan kendala ataupun hambatan dapat disesuaikan dengan baik.

REFERENSI

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran BTKLPP Kelas I Makassar tahun 2014 dan 2015

Petunjuk Teknis Penyusunan Perencanaan Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan tahun 2014 - 2015

Rencana Strategis Kementerian Kesehatan RI tahun 2015 – 2019

Rencana Aksi Program Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan tahun 2015 – 2019

Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 2349 tanggal 22 November 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Bidang Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit.

DAFTAR LAMPIRAN

No. Urut	Judul Lampiran
Lampiran1	Matrik Rencana Kinerja BTKLPP Kelas I Makassar Tahun 2015 – 2019
Lampiran 2.	Matrik Prakiraan Anggaran Maju BTKLPP Kelas I Makassar 2015–2019
Lampiran 3.	Matriks Prakiraan Anggaran Kegiatan berdasarkan Sumber Dana Tahun 2015 - 2019



**23 | Rencana Aksi Kegiatan
2015 - 2019**

4	Jumlah pengujian laboratorium dan kalibrasi	Jumlah pemeriksaan sampel di laboratorium secara fisik, kimia, dan biologi untuk sampel air, padat dan gas selama 1 tahun.	Sampel	2300	3000	3500	3900	4500
5	Jumlah model atau teknologi tepat guna bidang PP dan PL yang dihasilkan	Jumlah pengembangan teknologi tepat guna pengendalian penyakit, kesehatan lingkungan dan kesehatan mata.	jenis	4	4	7	8	8
6	Jumlah SDM terlatih Bidang PP dan PL	SDM terlatih baik internal atau eksternal yang mengikuti pendidikan/ pelatihan/ magang di BTKLPP dalam waktu 1 tahun	orang	200	210	210	220	230
7	Persentase kelengkapan dokumen perencanaan/ laporan/ pengelolaan keuangan/ kepegawaian/ BMN	Persentase jumlah kegiatan manajemen dan administrasi dalam mendukung pelaksanaan teknis dan program, meliputi : Dokumen Perencanaan dan anggaran, dokumenevaluasi dan pelaporan, dokumen pengelolaan keuangan, dokumen kepegawaian dan BMN.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	Persentase ketepatan waktu pengiriman laporan pengelolaan keuangan/ kepegawaian/ BMN	Persentase jumlah pengiriman laporan terkait dengan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal dan waktu yang telah ditetapkan setiap periode pengiriman laporan baik secara online maupun offline.	Ketepatan waktu 100%	100%	100%	100%	100%	100%
9	Perangkat Pengolah data komunikasi, informasi dan peralatan fasilitas perkantoran	Peralatan essensial dan sarana penunjang operasional	Set/Unit	5	15	30	40	50

Lampiran 2.

Matrik Prakiraan Anggaran Maju BTKLPP Kelas I Makassar 2015 – 2019

No	Uraian Kegiatan	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp.)	2019 (Rp.)
1	Pembinaan Surveilans, Imunisasi, Karantina dan Kesehatan Matra	380.657.000,-	513.886.950,-	693.747.383,-	936.558.966,-	1.264.354.605,-
2	Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang	869.352.000,-	1.173.625.200,-	1.584.394.020,-	2.138.931.927,-	2.887.558.101,-
3	Pengendalian Penyakit Menular Langsung	166.262.000,-	224.453.700,-	303.012.495,-	409.066.868,-	552.240.272,-
4	Pengendalian Penyakit Tidak Menular	226.058.000,-	305.178.300,-	411.990.705,-	556.187.452,-	750.853.060,-
5	Penyehatan Lingkungan	3.651.888.000,-	4.930.048.800,-	6.655.565.880,-	8.985.013.938,-	12.129.768.816,-
6	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	5.576.836.000,-	7.528.728.600,-	10.163.783.610,-	13.721.107.874,-	18.523.495.629,-
Jumlah Keseluruhan		10.871.053.000,-	14.675.921.550,-	19.812.494.093,-	26.746.867.025,-	36.108.270.484,-

Lampiran 3.

Matriks Prakiraan Anggaran Kegiatan berdasarkan Sumber Dana Tahun 2015 - 2019

No	Sumber Dana	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp.)	2019 (Rp.)
1	Rupiah Murni (RM)	10.466.053.000,-	14.200.921.550,-	19.317.494.093,-	26.206.867.025,-	35.523.270.484,-
2	PNBP	405.000.000,-	475.000.000,-	495.000.000,-	540.000.000,-	585.000.000,-
Jumlah Keseluruhan		10.871.053.000,-	14.675.921.550,-	19.812.494.093,-	26.746.867.025,-	36.108.270.484,-

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab
dr. H. Sukiman, M.Kes

Koordinator
Dr. Ernawaty, S.Si, M.Si

Anggota
Amran, SKM, M.Kes
dr. Trisnawaty
Tabita Mintu, SKM, M.Kes
Suarni AS, SKM, M.Kes
Yulce Rakkang, SKM, M.Kes
ST.MuLiana, S.Kom